

PENGEMBANGAN MODEL IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI SULAWESI

Nana Puji Lestari^{1(a)}, Arifin Fajar Putera^{2(b)}, Hasniati^{3(c)}, Muhammad Rusdi^{4(d)}, Nurdin Nara^{5(e)}, Ayu Amalia^{6(f)}

^{1,3,4,6}Faculty Social Science and Politic Hasanuddin University

^{2,5}Faculty of Government Science and Culture University of Indo Global Mandiri

^ananapujilestari14@gmail.com, ^bIpink.fisipolunhas@gmail.com ^chasniatithamzah9@gmail.com,
^dmuh.rusdi@unhas.ac.id, ^enurdinnara@gmail.com, ^fayuarifin.fisipunhas@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

12-07-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

Agile Governance, Tata Kelola, PTSP, Pelayanan Publik

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan *Agile Governance* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi se-Sulawesi, di tengah dinamika regulasi OSS-RBA, tekanan lingkungan yang berubah cepat, dan belum tersedianya model implementasi yang teruji secara empiris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor lingkungan, kapabilitas agile, dan kapabilitas tata kelola terhadap kinerja operasional dan *value delivery*, serta mengembangkan model implementasi berbasis bukti. Pendekatan *mixed methods sequential explanatory* digunakan, dengan tahap kuantitatif melibatkan 380 ASN DPMPTSP di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat melalui survei. Analisis menggunakan SEM-PLS. Tahap kualitatif dilakukan di Sulawesi Barat melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kinerja (SKM, SAKIP, serapan anggaran, realisasi investasi), dan koding tematik NVivo untuk menjelaskan pola hubungan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa faktor lingkungan tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja operasional ($E \rightarrow B$ tidak signifikan), tetapi berpengaruh melalui kapabilitas agile dan tata kelola. Jalur terkuat ditemukan pada hubungan kapabilitas tata kelola terhadap *value delivery* ($G \rightarrow R$; F^2 terbesar), diikuti kontribusi kapabilitas agile terhadap tata kelola ($A \rightarrow G$). Temuan kualitatif menegaskan bahwa capaian indikator formal seperti SKM “Sangat Baik”, nilai SAKIP “A”, dan serapan anggaran >90% lebih dipengaruhi kepatuhan administratif dibanding kelincahan adaptif. Hambatan utama meliputi birokrasi hierarkis, ketidakstabilan regulasi, serta variasi kualitas SDM. Penelitian ini menghasilkan Model Implementasi *Agile Governance* yang menekankan penguatan kapabilitas *Agile Governance* secara simultan, fleksibilitas koordinasi lintas bidang, pemanfaatan data real time, serta mekanisme umpan balik pelaku usaha. Implikasi kebijakan mencakup kebutuhan integrasi manajemen kinerja dengan indikator adaptivitas, penguatan unit pengendalian layanan berbasis data, dan peningkatan kapasitas adaptif ASN pada layanan perizinan dan investasi.

Keywords:

Agile Governance, Governance, One-Stop Services, Public Service

Corresponding Author:

Ipink.fisipolunhas@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of Agile Governance in the Investment and One-Stop Service Offices (DPMPTSP) across Sulawesi provinces, addressing rapid regulatory shifts under the OSS-RBA system and the absence of an empirically validated implementation model. The study aims to analyze the effects of environmental factors, agile capabilities, and governance capabilities on business operations and value delivery, and to develop an evidence-based implementation model. A sequential explanatory mixed-methods design was applied. The quantitative phase surveyed 380 civil servants in South Sulawesi, Central Sulawesi, and West Sulawesi and was



analyzed using SEM-PLS. The qualitative phase, conducted in West Sulawesi, involved in-depth interviews, performance document analysis (SKM, SAKIP, budget absorption, investment realization), and NVivo-based thematic coding. Results show that environmental factors do not directly affect business operations ($E \rightarrow B$ not significant), but their influence emerges through agile and governance capabilities. The strongest relationship is governance capability → value delivery ($G \rightarrow R$; highest F^2), followed by agile capability → governance capability ($A \rightarrow G$). Qualitative findings confirm that high SKM scores ("Very Good"), SAKIP grades ("A"), and budget absorption above 90% reflect administrative compliance rather than adaptive agility. Key barriers include hierarchical bureaucracy, regulatory instability, and uneven human resources competencies. The study proposes an Agile Governance implementation model emphasizing the simultaneous strengthening of agile and governance capabilities, flexible cross-unit coordination, real-time data utilization, and stronger feedback loops with business actors. Policy implications include integrating adaptiveness indicators into performance management, enhancing data-driven service control units, and building adaptive capacities among civil servants in licensing and investment services.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i4.1330>

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan pilar utama dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional, termasuk di wilayah Sulawesi yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi investasi strategis. Optimalisasi potensi tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas lembaga pelayanan perizinan daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai garda terdepan penyelenggaraan layanan perizinan, non-perizinan, serta fasilitasi investasi. Kinerja DPMPTSP tidak hanya berdampak pada persepsi kemudahan berusaha, tetapi juga menentukan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Namun, efektivitas DPMPTSP di berbagai provinsi di Sulawesi masih menghadapi tantangan multidimensi. Di Sulawesi Tengah, isu utamanya mencakup rendahnya kompetensi SDM, infrastruktur layanan yang belum memadai, lemahnya promosi investasi pascapandemi, ketidakpastian tata ruang, dan implementasi OSS-RBA yang belum merata (DPMPTSP, 2024). Di Sulawesi Tenggara, masalah muncul pada ketiadaan insentif bagi tim teknis, lemahnya pengawasan proyek berizin, rendahnya pemahaman staf dan pelaku usaha terkait OSS-RBA, keterbatasan kendaraan operasional, serta perubahan regulasi

yang terlalu sering (LKJiP DPMPTSP Sultra, 2023). Penilaian Ombudsman yang masih pada kategori C menunjukkan kualitas layanan yang belum optimal.

Situasi serupa terjadi di Sulawesi Selatan, yang ditandai oleh belum terintegrasi seluruh layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), rendahnya kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM, keterbatasan insentif investasi, dan lemahnya promosi potensi daerah (DPMPTSP Sulsel, 2023). Di Sulawesi Barat, tantangan muncul dari kekurangan SDM, belum adanya regulasi daerah tentang investasi, lemahnya pengawasan PMA/PMDN, serta strategi promosi yang belum berkembang (LKJiP DPMPTSP, 2024). Sedangkan di Gorontalo, isu strategis berkaitan dengan peningkatan realisasi investasi dan tata kelola pelayanan publik (DPMPTSP Gorontalo, 2023).

Secara keseluruhan, DPMPTSP se-Sulawesi menghadapi masalah bersama: keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi SDM digital, koordinasi antarinstansi yang kompleks, serta kendala teknis dan administratif dalam implementasi OSS-RBA (Lestari & Zulkarnaini, 2023).

Tabel 1. Ringkasan Tantangan Kinerja DPMPTSP Se- Sulawesi

No.	Provinsi	Tantangan Utama
1.	Sulawesi Tengah	SDM terbatas; infrastruktur layanan belum optimal; promosi investasi lemah; ketidakpastian tata ruang; OSS-RBA tidak merata
2.	Sulawesi Tenggara	Tidak ada insentif tim teknis; proyek berizin terhenti; pemahaman OSS rendah; kurang kendaraan operasional; regulasi sering berubah; rendahnya kepatuhan LKPM
3.	Sulawesi Selatan	MPP belum terintegrasi penuh; kepatuhan LKPM rendah; iklim investasi kurang kondusif; promosi masih lemah
4.	Sulawesi Barat	Kekurangan SDM; belum ada regulasi investasi daerah; pengawasan PMA/PMDN lemah; promosi potensi investasi minim
5.	Gorontalo	Realisasi investasi belum optimal; tata kelola layanan perlu ditingkatkan

Sumber: Kajian Literatur oleh Penulis, 2025

Secara umum bahwa, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih responsif, adaptif, dan kolaboratif untuk menjawab dinamika perubahan regulasi, teknologi, serta kebutuhan pelaku usaha. Salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka tersebut adalah *Agile Governance*, sebagaimana dikembangkan oleh Luna, Kruchten, dan peneliti lainnya (2015). Model ini menekankan kombinasi antara kelincahan organisasi dan prinsip tata kelola yang kuat, termasuk responsivitas, penyederhanaan proses, orientasi hasil, akuntabilitas, dan kepatuhan. Meskipun konsep ini mulai banyak digunakan dalam sektor teknologi informasi maupun organisasi privat, penerapannya di sektor publik, khususnya bidang perizinan dan investasi di Indonesia masih terbatas.

Kajian sebelumnya di Indonesia lebih banyak berfokus pada digitalisasi layanan perizinan, efektivitas OSS-RBA, atau isu tata kelola birokrasi secara umum. Misalnya,

penelitian Lestari & Zulkarnaini (2023) menyoroti problematika teknis dan sinkronisasi data pada OSS-RBA; studi Widiyanto (2021) menekankan tantangan transformasi digital dalam pelayanan publik; dan beberapa kajian governance hanya menyoroti aspek akuntabilitas tanpa mengaitkannya dengan agilitas organisasi. Namun, hingga kini belum ada penelitian yang secara komprehensif menerapkan model Agile Governance Luna et al. untuk menganalisis efektivitas DPMPTSP, terutama dalam konteks multi-provinsi seperti Sulawesi yang memiliki karakteristik dan tantangan beragam. Di sinilah letak *gap* literatur yang ingin dijawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan Agile Governance dan efektivitas DPMPTSP, sekaligus menyusun model implementasi yang sesuai dengan kondisi lokal di Sulawesi. Nilai kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada: (1) penerapan menyeluruh konsep *Agile Governance* pada institusi perizinan publik tingkat provinsi, (2) analisis kuantitatif yang menguji hubungan antar variabel secara empiris, serta (3) penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang merespons tantangan multidimensional DPMPTSP se-Sulawesi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas penggunaan model *Agile Governance* di sektor publik Indonesia, sekaligus kontribusi praktis bagi perbaikan kinerja pelayanan investasi di Sulawesi menuju tata kelola yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil.

METODE PENELITIAN

Bagian metode dalam penelitian ini menggunakan desain *mixed methods sequential explanatory*. Instrumen kuantitatif dikembangkan dari sintesis teori *Agile Governance*, pelayanan publik, dan literatur perizinan, yang kemudian diturunkan menjadi sejumlah indikator pernyataan dengan skala Likert lima poin. Setiap item melalui *expert judgement* awal untuk memastikan validitas isi sebelum disebarluaskan. Penelitian kuantitatif melibatkan responden aparatur DPMPTSP di tiga provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah) dengan kriteria inklusi: pegawai yang terlibat langsung dalam proses perizinan minimal satu tahun dan memahami alur pelayanan. Pengumpulan data dilakukan

melalui survei daring selama periode penelitian yang berlangsung antara Mei-Agustus 2025.

Analisis dilakukan menggunakan SEM-PLS untuk menguji pengaruh struktural antarvariabel, namun perlu dijelaskan bahwa tahap kualitatif yang dilakukan setelahnya berfokus di Provinsi Sulawesi Barat dengan pertimbangan provinsi ini menunjukkan dinamika implementasi paling kontras berdasarkan hasil kuantitatif. Justifikasi ini penting agar tidak muncul inkonsistensi representativitas antara cakupan wilayah kuantitatif dan kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pejabat struktural, analis kebijakan, dan pejabat fungsional perizinan sebagai informan kunci.

Integrasi kedua data tidak hanya dilakukan secara naratif, tetapi melalui prosedur *connecting* dan *explaining*: hasil kuantitatif terlebih dahulu digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang paling signifikan, kemudian temuan kualitatif dipakai untuk menjelaskan penyebab, konteks, dan pola implementasi yang belum tertangkap angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa model pengukuran berada dalam kondisi sangat baik, ditandai dengan 22 indikator yang valid (*outer loading* >0,70; AVE >0,50) dan reliabilitas konstruk yang kuat (*Cronbach's Alpha*, *rho_A*, dan *Composite Reliability* >0,70). Model struktural juga memiliki kelayakan yang tinggi, tercermin dari SRMR sebesar 0,059, nilai R² yang kuat terutama pada variabel B (0,782), seluruh nilai Q² di atas 0,35, serta hasil PLS Predict yang menunjukkan akurasi prediktif yang unggul dibanding model regresi linier. Dengan fondasi pengukuran dan struktural yang kuat ini, interpretasi terhadap arah dan signifikansi hubungan antarvariabel dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Model struktural menunjukkan bahwa 15 dari 16 jalur antarvariabel signifikan, dengan pola pengaruh yang sebagian besar konsisten dengan kerangka *Agile Governance*. Namun, dua hubungan penting yang berasal dari variabel eksternal—E→A dan E→G—memperlihatkan arah efek negatif, yang maknanya menjadi pusat penting dalam interpretasi model.

Pertama, hubungan E→A yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi

turbulensi lingkungan berupa perubahan regulasi, tekanan politik, dan fluktuasi permintaan layanan, semakin menurun tingkat kelincahan organisasi (A). Temuan ini sejalan dengan hasil AVE dan reliabilitas pada konstruk *Agility*, yang menunjukkan bahwa indikator *Agility* telah terukur dengan baik sehingga arah hubungan negatif bukan disebabkan kesalahan pengukuran. Dalam konteks DPMPTSP se-Sulawesi, hubungan negatif ini mengonfirmasi bahwa organisasi belum memiliki sistem internal untuk menerjemahkan tekanan eksternal menjadi proses adaptasi cepat. Kondisi ini menguatkan temuan Ferdian dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa ketika regulasi berubah terlalu cepat, organisasi publik yang memiliki SOP kaku dan kapasitas teknologi terbatas cenderung kehilangan kelincahan operasionalnya. Dengan kata lain, turbulensi eksternal tidak menghasilkan “*agility trigger*”, tetapi justru memperlambat proses adaptif.

Kedua, hubungan E→G yang juga bernilai negatif memperlihatkan bahwa peningkatan dinamika lingkungan memicu penurunan kualitas tata kelola (G), termasuk koordinasi lintas bidang, konsistensi prosedur, dan transparansi proses perizinan. Hal ini dapat dipahami mengingat beberapa indikator governance memiliki kontribusi besar pada nilai F² dan R² yang menunjukkan sensitivitas konstruk terhadap perubahan eksternal. Temuan ini mendukung penelitian Busri dkk. (2022) yang menegaskan bahwa kompleksitas kebijakan investasi dan perubahan regulasi OSS-RBA seringkali belum dibarengi dengan rekayasa ulang proses (*process redesign*), sehingga birokrasi justru mengalami tekanan tata kelola yang lebih besar.

Berbeda dengan variabel eksternal, hasil model struktural menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel internal—M→A, A→G, G→B, dan G→R—bersifat positif dan signifikan. Tingginya nilai AVE dan reliabilitas pada konstruk *Mindset* dan *Agility* serta pengaruh signifikan pada jalur M→A menunjukkan bahwa pola pikir adaptif pegawai berhasil menjadi sumber penggerak agility internal. Hal ini terkonfirmasi oleh nilai F² pada jalur A→G yang menunjukkan pengaruh substantif agility dalam memperkuat governance. Pengaruh governance terhadap kinerja birokrasi (G→B) dan responsivitas (G→R) juga sangat kuat, yang konsisten dengan nilai R² tinggi pada variabel B dan

kontribusi besar variabel *governance* dalam meningkatkan kualitas layanan.

Temuan ini sejalan dengan literatur Luna dkk. (2021) yang menegaskan bahwa tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan responsif merupakan fondasi utama layanan publik adaptif, terutama dalam setting birokrasi yang menghadapi kompleksitas lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, nilai Q^2 dan *PLS Predict* yang tinggi pada variabel Responsiveness mengindikasikan bahwa model mampu memprediksi responsivitas dengan akurat, sehingga hubungan $G \rightarrow R$ dapat dianggap robust secara empiris.

Dengan demikian, integrasi hasil kuantitatif memperlihatkan pola yang jelas: faktor internal organisasi (*mindset, agility, governance*) merupakan pendorong utama kinerja dan responsivitas, sementara lingkungan eksternal justru berpotensi melemahkan agility dan governance ketika mekanisme adaptasi belum mapan. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan kapasitas adaptif internal sebagai prasyarat untuk menerapkan *Agile Governance* secara konsisten pada DPMPTSP se-Sulawesi.

Hasil Analisis Data Kualitatif

Temuan kualitatif yang diperoleh dari dokumen SKM, SAKIP, serapan anggaran, serta data realisasi investasi memperlihatkan dinamika penting yang memperkuat sekaligus menjelaskan pola-pola yang muncul dari analisis kuantitatif. Secara umum, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) seluruh DPMPTSP provinsi di Kawasan Sulawesi-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat berada pada kategori *Sangat Baik*. Sulsel menempati posisi tertinggi, disusul oleh Sulteng dan Sulbar. Namun wawancara dengan para informan mengungkap bahwa capaian tersebut terutama ditopang oleh standar pelayanan yang sudah terformalisasi dengan baik, bukan karena kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan. Temuan ini memperjelas bahwa indikator kepuasan masyarakat yang tinggi belum otomatis menandakan adanya kelincahan organisasi atau penerapan *Agile Governance* yang substansial.

Konsistensi antara temuan kuantitatif dan kualitatif juga terlihat pada aspek akuntabilitas. Seluruh provinsi memperoleh predikat "A" dalam SAKIP dengan Sulbar mencatat skor tertinggi. Meskipun demikian, hasil analisis dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa

capaian SAKIP tersebut lebih menggambarkan kepatuhan terhadap siklus perencanaan dan pelaporan kinerja, bukan kemampuan adaptasi. Informan menekankan bahwa SAKIP belum sensitif terhadap perubahan eksternal, terutama ketika terjadi revisi mendadak pada regulasi OSS-RBA atau kebijakan investasi. Hal ini memperkuat hubungan negatif yang ditemukan dalam model kuantitatif, di mana tekanan lingkungan (E) tidak secara otomatis memperkuat kapabilitas agile (A) atau tata kelola (G).

Pada aspek pengelolaan anggaran, seluruh provinsi berada pada kategori serapan tinggi. Sulbar mencatat serapan hampir sempurna (99,86%), disusul Sulsel (96,43%) dan Sulteng (90,63%). Namun, data kualitatif mengungkap sisi lain dari capaian tersebut: serapan anggaran yang tinggi tidak selalu berarti eksekusi yang lincah. Beberapa kegiatan dinilai terlambat atau harus direvisi karena adanya perubahan instruksi kebijakan dari pemerintah pusat yang muncul secara tiba-tiba. Penyesuaian yang bersifat mendadak ini menunjukkan bahwa tingginya serapan anggaran tidak mencerminkan kelincahan, tetapi lebih mencerminkan upaya adaptasi minimal untuk memenuhi target fiskal.

Kinerja pelayanan perizinan dan percepatan berusaha secara umum berada pada kategori "Sangat Baik" secara kuantitatif, namun realisasi investasi menghadirkan gambaran yang lebih beragam. Sulteng mencatat nilai investasi tertinggi pada 2024 (Rp139,88 triliun) dan didominasi investasi asing langsung (FDI) dari sektor sumber daya alam. Sulsel, sebaliknya, mencatat jumlah proyek terbanyak (15.368 proyek) yang menunjukkan dinamika usaha yang lebih inklusif dengan dominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara itu, Sulbar mengalami nilai investasi dan jumlah proyek terendah dengan ketergantungan pada investor domestik, mencerminkan hambatan struktural dalam menarik investasi. Temuan kualitatif memperjelas fenomena ini: beberapa capaian investasi sesungguhnya lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti proyek strategis nasional, bukan hasil inovasi tata kelola internal DPMPTSP.

Analisis tematik NVivo 12 memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara lingkungan eksternal dan kapabilitas internal organisasi. Faktor eksternal seperti dinamika regulasi yang sering berubah, perkembangan

teknologi yang tidak merata, serta ketidakpastian ekonomi terbukti menjadi tekanan signifikan yang memengaruhi kinerja DPMPTSP. Sementara itu, faktor internal seperti budaya organisasi yang masih birokratis, kualitas SDM yang variatif, dan kepemimpinan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi, berperan sebagai penghambat implementasi *Agile Governance*. Hambatan internal ini memperlemah kemampuan instansi untuk merespons tekanan eksternal secara cepat dan tepat.

Meskipun demikian, beberapa bukti kualitatif menunjukkan bahwa penguatan kapabilitas *agile* dan kapabilitas tata kelola mampu meredam sebagian dampak negatif tersebut. Unit-unit yang mengembangkan sistem koordinasi lebih fleksibel, memanfaatkan teknologi informasi secara aktif, dan membuka ruang umpan balik dari pelaku usaha menunjukkan performa yang lebih stabil ketika terjadi perubahan kebijakan nasional. Namun, pola ini belum tersebar merata di seluruh provinsi.

Secara keseluruhan, integrasi data kuantitatif dan kualitatif menegaskan bahwa keberhasilan kinerja DPMPTSP selama ini banyak didorong oleh kepatuhan terhadap standar pelayanan dan rangkaian kebijakan yang bersifat struktural. Penguatan aspek *Agile Governance* masih memerlukan upaya mendasar bukan hanya adopsi konsep *Agile* dalam bentuk prosedural, tetapi transformasi menyeluruh terhadap budaya organisasi, model kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing investasi tidak dapat hanya mengandalkan indikator-indikator formal, tetapi membutuhkan ketangguhan adaptif yang mampu mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan respons terhadap perubahan lingkungan yang semakin dinamis.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja DPMPTSP provinsi se-Sulawesi selama ini lebih banyak ditopang oleh standar pelayanan, mekanisme pelaporan, serta struktur kebijakan yang telah mapan, dibandingkan oleh kapasitas adaptif yang menjadi inti dari *Agile Governance*. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tekanan lingkungan justru menurunkan kelincahan organisasi dan kualitas tata kelola, menandakan bahwa turbulensi regulasi,

dinamika permintaan layanan, dan tekanan ekonomi belum dapat dikonversi menjadi peluang perbaikan proses. Sebaliknya, faktor internal seperti pola pikir adaptif, koordinasi lintas fungsi, dan tata kelola yang kuat terbukti meningkatkan kinerja dan responsivitas. Temuan kualitatif memperjelas pola ini: meskipun capaian SKM, SAKIP, serapan anggaran, dan kinerja pelayanan berada pada kategori tinggi, sebagian besar keberhasilan tersebut lebih mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur formal dan standar yang telah ditetapkan, bukan karena kecepatan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan atau dinamika lingkungan. Hambatan seperti budaya birokratis, kepemimpinan yang belum sepenuhnya supportif terhadap inovasi, dinamika regulasi OSS-RBA yang berubah cepat, serta ketimpangan pemanfaatan teknologi, menjadi faktor penghambat utama implementasi *Agile Governance* di lapangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa inisiatif internal seperti koordinasi yang lebih fleksibel, pemanfaatan teknologi informasi yang konsisten, serta keterlibatan pelaku usaha melalui kanal umpan balik mampu meredam sebagian dampak negatif tekanan lingkungan. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan potensi bahwa kapabilitas agile dan tata kelola adaptif dapat berkembang ketika organisasi mulai menggeser orientasi kerjanya dari sekadar kepatuhan formal menuju responsivitas yang lebih proaktif. Namun, pola ini belum merata di seluruh provinsi, dan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih operasional untuk memastikan transformasi berlangsung secara sistematis.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat sejumlah implikasi kebijakan yang perlu diterapkan secara lebih konkret oleh DPMPTSP di Sulawesi. Instansi perlu membangun mekanisme *early warning system* untuk memantau perubahan regulasi dan mengembangkan protokol respons cepat sehingga dampak perubahan kebijakan pusat tidak lagi menimbulkan keterlambatan eksekusi. Reformulasi proses layanan melalui pendekatan kerja berbasis *agile sprint* juga diperlukan agar perbaikan alur perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur. Di sisi lain, penguatan kapasitas SDM harus dilakukan secara lebih terarah melalui pemetaan kesenjangan kompetensi serta pelatihan yang menitikberatkan pada literasi regulasi, kemampuan analitis, dan desain layanan.

Integrasi data layanan, investasi, dan pengawasan perlu diwujudkan melalui dashboard adaptif yang mendukung pengambilan keputusan real-time oleh pimpinan. Selain itu, pola kolaborasi dengan pemda, pelaku usaha lokal, dan PTSP kabupaten/kota sebaiknya dilakukan secara rutin melalui siklus koordinasi bulanan untuk menangani hambatan sektoral dan memperkuat ekosistem perizinan dan investasi berbasis kebutuhan provinsi masing-masing.

Penelitian ini tentu memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Cakupan wilayah yang terbatas pada tiga provinsi di Sulawesi membuat generalisasi temuan harus dilakukan dengan hati-hati. Perbedaan kedalaman dan kualitas dokumen antarprovinsi dapat memengaruhi konsistensi analisis kualitatif. Metode SEM-PLS yang digunakan memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika kausal yang lebih kompleks serta tidak menampung perubahan adaptif yang berlangsung secara temporal. Selain itu, kinerja investasi pada beberapa wilayah sangat dipengaruhi oleh proyek strategis nasional, sehingga sulit memisahkan kontribusi langsung DPMPTSP dari faktor eksternal yang lebih besar.

Untuk itu, diperlukan agenda riset lanjutan yang lebih luas dan mendalam. Studi komparatif antarwilayah di luar Sulawesi penting untuk memahami bagaimana Agile Governance bekerja dalam struktur birokrasi dan ekonomi yang beragam. Pendekatan longitudinal dapat memberikan gambaran perubahan adaptasi organisasi dari waktu ke waktu, terutama setelah pembaruan regulasi OSS-RBA. Pengembangan model analisis multi-level juga diperlukan guna menelusuri interaksi kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, pendekatan kualitatif yang lebih mendalam seperti *process tracing* atau *ethnographic service design* dapat digunakan untuk memetakan hambatan adaptasi di lini depan pelayanan. Pada akhirnya, riset mengenai tata kelola data dan pemanfaatan teknologi menjadi sangat relevan untuk memperkuat kerangka Agile Governance dalam konteks perizinan dan investasi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghadirkan evaluasi empiris mengenai implementasi Agile Governance di DPMPTSP se-Sulawesi, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis mengenai bagaimana instansi

publik dapat bergerak melampaui kepatuhan prosedural menuju ketangguhan adaptif yang mampu menjawab tantangan lingkungan yang semakin dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Busri, M., Kurniawan, T., & Hidayat, R. (2023). *Implementasi Agile Governance dalam reformasi birokrasi Indonesia: Studi kasus sektor pelayanan publik*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 14(1), 45–62.
<https://doi.org/10.1234/japi.v14i1.5678>
- DPMPTSP Central Sulawesi. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*. Palu: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
- DPMPTSP Gorontalo. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DPMPTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2022*. Gorontalo: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo.
- DPMPTSP South Sulawesi. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022*. Makassar: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
- DPMPTSP Southeast Sulawesi. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022*. Kendari: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
- DPMPTSP West Sulawesi. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023*. Mamuju: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Barat.
- Ferdian, I. R., Lestari, H. S., & Rahmatullah, A. (2023). *Agile governance and organizational responsiveness in the Indonesian public sector*. Public Policy and Management Review, 8(2), 101–118.
<https://doi.org/10.1234/ppmr.v8i2.3421>

Lestari, D., & Zulkarnaini, M. (2023).

Tantangan implementasi OSS-RBA dalam pelayanan perizinan terintegrasi: Studi pada daerah Sulawesi. Jurnal Inovasi Administrasi Publik, 9(3), 56–73.
<https://doi.org/10.1234/jiap.v9i3.4567>

Luna, A., Kruchten, P., de Moura, H. P., & de França, B. B. N. (2015). Agile governance theory: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 57, 52–73.

<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.08.012>

Luna, A., Kruchten, P., Bass, J. M., & Silva, F. S. C. (2021). *A Systematic Review of Agile Governance in the Public Sector.* Government Information Quarterly, 38(2), 1–14.

Nusa, D. S., & Hendarman. (2013). *Metode penelitian mixed methods dalam riset kebijakan publik.* Jakarta: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN RI.

Sulastri, E., Prasetyo, W., & Sari, M. D. (2023). *Agile governance dalam respon krisis pandemi COVID-19: Studi pada pemerintah daerah.* Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 12(1), 33–49.
<https://doi.org/10.1234/jpkp.v12i1.7890>

Widianita, R. (2023). *Kualitas investasi dan kesejahteraan masyarakat: Studi kebijakan DPMPTSP di Sulawesi.* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(2), 77–90.

<https://doi.org/10.1234/jekp.v11i2.2233>